

**TEORI MODERNISASI DALAM EKONOMI POLITIK; ANALISIS FAKTOR
KETERBELAKANGAN EKONOMI INDONESIA DALAM PERBANDINGAN DENGAN
KOREA SELATAN****Fathimah Syirin**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail : Fatimahsyirin03@gmail.com**Abstract**

Indonesia and South Korea have contrasting economic trajectories despite their differences in natural resources. Indonesia, rich in natural resources, has not fully capitalized on its potential, while South Korea, with fewer resources, has emerged as a leading economic power. This study focuses on the role of human resources and policy in shaping these disparities, using modernization theory within political economy as the analytical lens. The research employs a qualitative comparative method, analyzing human capital development, economic policies, and institutional structures of both nations. Findings show that South Korea's success is largely attributed to investments in human capital, education, and consistent, long-term economic policies that foster industrial growth. In contrast, Indonesia's underdevelopment stems from challenges in education, weak institutional frameworks, and inconsistent policy implementation. The study concludes that Indonesia must focus on improving its human resources through better education, stronger institutions, and more coherent policies to harness its natural resources effectively and stimulate sustained economic growth.

Keywords: Human Resources, Economic Development, Policy, Indonesia, South Korea, Modernization Theory

Abstrak

Indonesia dan Korea Selatan memiliki jalur ekonomi yang sangat berbeda meskipun keduanya memiliki sumber daya alam. Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam, belum sepenuhnya memanfaatkan potensinya, sementara Korea Selatan, yang lebih terbatas sumber dayanya, telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi utama. Penelitian ini berfokus pada peran sumber daya manusia dan kebijakan dalam membentuk ketimpangan ini, dengan menggunakan teori modernisasi dalam ekonomi politik sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode komparatif kualitatif, dengan menganalisis pengembangan sumber daya manusia, kebijakan ekonomi, dan kerangka institusional dari kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Korea Selatan banyak dipengaruhi oleh investasi dalam sumber daya manusia, pendidikan, dan kebijakan ekonomi yang konsisten dan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan industri. Sebaliknya, keterbelakangan Indonesia disebabkan oleh tantangan dalam bidang pendidikan, kerangka institusi yang lemah, dan implementasi kebijakan yang tidak konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu fokus pada peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan yang lebih baik, penguatan institusi, dan kebijakan yang lebih koheren untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara efektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Pembangunan Ekonomi, Kebijakan, Indonesia, Korea Selatan, Teori Modernisasi

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagirism Checker No
931.873.873Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi salah satu target utama berbagai negara di dunia. Namun, jalur serta keberhasilan tiap negara dalam mencapainya berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat pada kasus Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah,

seperti tambang, hutan, dan hasil laut. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, Korea Selatan, meskipun memiliki sumber daya alam yang terbatas, berhasil menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam waktu relatif singkat. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di satu negara dan menghambatnya di negara lain.

Faktor utama yang membedakan kedua negara tersebut adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan ekonomi yang diterapkan. Koentjaraningrat (dalam Effendi dan Malihah, 2011, hlm. 68) menjelaskan bahwa modernisasi adalah proses penyesuaian hidup dengan kondisi dunia saat ini. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tingkat modern, sebuah masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kemajuan yang telah dicapai oleh dunia di sekitarnya. Modernisasi, yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak hanya mencakup aspek fisik atau material, tetapi juga melibatkan perubahan mendasar pada sikap mental. Individu yang telah mengalami modernisasi cenderung memiliki pola pikir yang maju, rasional, berjiwa kewirausahaan, berorientasi ke masa depan, dan berbagai karakteristik lainnya. Situasi ini menegaskan pentingnya evaluasi mendalam mengenai peran SDM dan kebijakan ekonomi dalam mendukung pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan mendasar antara Indonesia dan Korea Selatan dari aspek SDM, kebijakan ekonomi, serta kerangka institusi yang mendukung atau menghambat pertumbuhan.

Menurut Uchjana (1989, hlm. 149), manusia modern memiliki dua jenis karakteristik utama: internal dan eksternal. Karakteristik internal berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan, sementara karakteristik eksternal berhubungan dengan lingkungan. Berikut adalah ciri-ciri manusia modern yang diuraikan oleh Uchjana (1989, hlm. 151–155):

- a) Keterbukaan terhadap pengalaman baru, inovasi, dan perubahan.
- b) Kemampuan untuk membentuk opini mengenai berbagai persoalan, baik dalam lingkungannya sendiri maupun di luar lingkungannya, dengan orientasi opini yang lebih demokratis.
- c) Lebih fokus pada masa kini dan masa depan daripada terikat pada masa lalu.
- d) Lebih mengutamakan pendidikan
- e) Meyakini bahwa manusia dapat mengendalikan lingkungannya untuk mencapai tujuan, alih-alih dikuasai sepenuhnya oleh lingkungan tersebut.
- f) Memiliki keyakinan bahwa dunia dapat diprediksi dan percaya bahwa orang lain serta institusi di sekitarnya dapat diandalkan dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab.
- g) Lebih sensitif terhadap harga diri orang lain dan siap menunjukkan penghormatan, serta lebih percaya pada sains dan teknologi meskipun dalam bentuk yang sederhana.
- h) Memiliki kepercayaan terhadap keadilan yang merata.
- i) SDM berkualitas

Prinsip dasar dari teori modernisasi mencakup ;

1. Negara-negara maju memiliki peran dominan yang dipandang positif, terutama melalui penyebaran nilai-nilai modern serta pemberian bantuan modal dan teknologi. Kegagalan pembangunan lebih dianggap sebagai akibat dari faktor internal daripada pengaruh eksternal.

2. Teori modernisasi menyatakan bahwa resep pembangunan bersifat universal dan dapat diterapkan di mana saja, kapan saja, serta oleh siapa saja (Budiman, dalam Frank, 1984: x).

Salah satu ciri utama teori modernisasi adalah pandangannya yang cenderung mengabaikan faktor eksternal sebagai penyebab kegagalan pembangunan, dengan lebih menekankan pada kelemahan internal dalam masyarakat. Pandangan ini menuai banyak kritik, terutama dari pendukung teori Dependensi, yang kemudian memunculkan paradigma baru yang dikenal sebagai teori Modernisasi Baru (Suwarsono-So, 1991: 58-61).

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, namun, kualitas SDM yang berkembang di negara ini sering kali tidak sebanding dengan potensi tersebut. Di sisi lain, Korea Selatan, meskipun memiliki sumber daya alam terbatas, berhasil mencetak SDM yang unggul dan berkompoten, yang menjadi salah satu pendorong utama kemajuan mereka. Korea Selatan memiliki sistem pendidikan yang sangat kompetitif, dengan fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan inovasi. Sejak pasca Perang Korea, pemerintah Korea Selatan telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam sektor pendidikan. Kebijakan utama pemerintah berorientasi pada pemberian akses pendidikan berkualitas untuk seluruh warga negara, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ini menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap bekerja di berbagai bidang, khususnya teknologi dan manufaktur.

Selain itu, Korea Selatan memiliki sejumlah universitas dan lembaga riset ternama yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem pendidikan mereka juga berfokus pada ujian dan pencapaian, yang mendorong siswa untuk mencapai standar tinggi di berbagai disiplin ilmu. Program pelatihan vokasi dan penelitian teknologi juga mendapatkan perhatian besar, yang berkontribusi pada terciptanya tenaga kerja terampil di bidang teknologi informasi, elektronik, dan manufaktur.

Sebaliknya, meskipun Indonesia memiliki sistem pendidikan yang terus berkembang, kualitas pendidikan di banyak daerah masih sangat bervariasi. Di sejumlah wilayah, akses ke pendidikan berkualitas masih terbatas, dan infrastruktur pendidikan tidak selalu mendukung pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, kualitas pendidikan relatif lebih baik, namun di banyak daerah pedesaan, tantangan masih ada dalam hal fasilitas pendidikan dan pelatihan yang memadai. Selain itu, Indonesia menghadapi masalah dalam menciptakan kurikulum yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi yang pesat. Banyak lulusan pendidikan tinggi di Indonesia yang tidak sepenuhnya siap menghadapi tantangan dunia kerja, terutama di bidang-bidang yang membutuhkan keterampilan teknis dan inovatif. Hal ini berkontribusi pada rendahnya tingkat produktivitas di beberapa sektor ekonomi yang lebih bergantung pada keterampilan manual dan kurang berkembang dalam hal inovasi teknologi. Salah satu alasan mengapa Korea Selatan lebih maju adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan teknologi dan inovasi. Pendidikan yang kuat di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) memungkinkan tenaga kerja di Korea Selatan berperan aktif dalam revolusi industri 4.0 dan sektor-sektor berbasis teknologi tinggi. Selain itu, negara ini berhasil menciptakan ekosistem yang mendukung riset dan pengembangan (R&D), yang menghasilkan perusahaan teknologi besar seperti Samsung dan LG yang menjadi pemain global.

Di sisi lain, Indonesia, meskipun memiliki potensi besar di sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan ekstraksi sumber daya alam, belum sepenuhnya mengembangkan SDM-nya untuk menghadapi tantangan di sektor teknologi dan industri berbasis pengetahuan. Kurangnya pemanfaatan penuh potensi inovasi dan riset di Indonesia menghambat kemampuannya untuk bersaing di tingkat global.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai faktor-faktor kemajuan negara melalui penerapan teori modernisasi pada dua negara yang sangat berbeda. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan baru mengenai pentingnya peningkatan kualitas SDM dalam sebuah negara. Peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat berdampak positif terhadap perbaikan dalam berbagai aspek, seperti kehidupan sosial, pendidikan, sistem pemerintahan, dan politik suatu negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perubahan dalam menghadapi permasalahan serupa, baik dalam skala makro maupun mikro.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menerapkan studi deskriptif komparatif dengan metode studi literatur. Teknik yang digunakan mencakup analisis data yang diperoleh melalui pengumpulan informasi dan data, pengklasifikasian data, penyajian data, serta reduksi data untuk menarik kesimpulan dari berbagai sumber pustaka. Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, penelitian sebelumnya, serta situs web yang relevan dengan ekonomi politik Indonesia dan Korea Selatan.

HASIL DAN DISKUSI

Teori modernisasi merupakan pendekatan dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa negara-negara yang ingin mencapai kemajuan ekonomi dan sosial harus melalui serangkaian tahapan perkembangan yang melibatkan perubahan struktural di berbagai sektor. Teori ini menegaskan bahwa perkembangan sebuah negara tidak terjadi secara cepat, melainkan melalui langkah-langkah yang terorganisir dan terstruktur. Dengan demikian, negara-negara yang ingin berkembang harus mengimplementasikan perubahan dalam beberapa aspek utama, seperti pendidikan, infrastruktur, sistem politik, dan ekonomi. McClelland berpendapat bahwa jika suatu masyarakat menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka yang perlu diutamakan adalah meningkatkan dorongan berprestasi individu dalam masyarakat tersebut. McClelland menyamakan kebutuhan akan prestasi (n-ach/Need for Achievement) seperti "virus" yang perlu ditularkan kepada orang-orang di masyarakat yang ingin mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan. Individu dengan kebutuhan berprestasi yang tinggi biasanya bersikap proaktif dan cenderung menghindari rutinitas. Mereka lebih suka mencari informasi untuk menemukan cara yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas. Orang-orang seperti ini merasa nyaman dalam lingkungan kerja yang memberikan umpan balik atas kinerja mereka, karena mereka lebih peduli pada seberapa baik mereka menyelesaikan masalah daripada seberapa baik mereka berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, individu dengan kebutuhan berprestasi yang tinggi lebih menyukai pekerjaan yang memberikan umpan balik yang jelas dan cepat sehingga mereka dapat menilai kualitas pekerjaan mereka. Mereka bertanggung jawab secara pribadi atas hasil kerja mereka dan merasa puas ketika melakukan tugas dengan benar dan baik. Fokus utama mereka adalah menyelesaikan tugas dengan sempurna, tanpa terlalu memperhatikan hubungan interpersonal dengan orang lain. Dalam konteks ini, teori modernisasi mencakup reformasi birokrasi. Reformasi ini tidak hanya berfokus pada perubahan fisik (struktur birokrasi), tetapi yang lebih penting adalah reformasi budaya (perubahan budaya) dan perubahan pola pikir (mindset) dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Jika dikaji dengan pendekatan tentang teori-teori pilihan yang termasuk dalam teori Modernisasi dapat dibandingkan dengan jelas di negara Indonesia :

1. Sistem Pendidikan

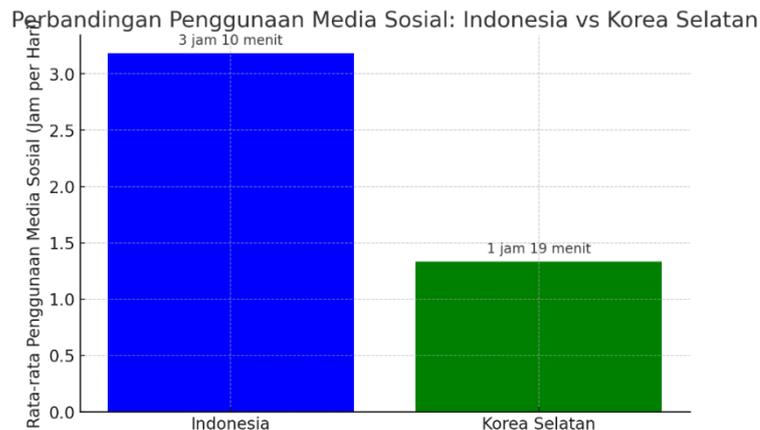
Indonesia, meskipun telah menyadari pentingnya pendidikan untuk pembangunan ekonomi, masih menghadapi tantangan dalam pemerataan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, fokus sering kali lebih terbagi antara memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang lebih terpencil. Sedangkan Korea Selatan, telah menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional, melakukan investasi besar dalam sektor ini, serta menyelaraskan sistem pendidikan dengan rencana pembangunan negara. Negara ini menyadari bahwa tenaga kerja yang terlatih dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun terbatas dalam sumber daya untuk berinvestasi di setiap sekolah. Oleh karena itu, Korea mengadopsi pendekatan yang bertahap, berurutan, dan berjenjang. Proses pengembangan ini dimulai dengan pendidikan dasar, kemudian berlanjut ke pendidikan menengah, dan akhirnya pendidikan tinggi. Fokus utama Korea Selatan adalah pada pendekatan yang mencakup kuantitas dan kualitas secara berurutan. Awalnya, perhatian diberikan pada peningkatan jumlah sekolah, siswa, dan guru pada tahun 1950. Setelah itu, Korea Selatan mulai fokus pada peningkatan kualitas pendidikan (Park et al., 2015).

Masyarakat Korea Selatan memiliki ketertarikan dan semangat yang sangat besar terhadap pendidikan, baik untuk diri mereka sendiri maupun anak-anak mereka, karena pendidikan dianggap sebagai simbol kehormatan dalam keluarga. Bahkan, dalam beberapa kasus, hal ini berdampak buruk seperti angka bunuh diri yang tinggi terkait dengan kegagalan akademis. Orang tua di Korea Selatan sangat mendorong anak-anak mereka untuk mengikuti les tambahan di luar sekolah untuk memperdalam materi yang sudah diajarkan. Para siswa pun rela menghabiskan waktu satu tahun ekstra untuk mengikuti les privat sebelum melanjutkan ke universitas. Pendidikan dianggap sebagai prestise tinggi, sehingga kegagalan dalam mencapai standar pendidikan sering kali berujung pada tekanan besar, bahkan hingga berakibat fatal (Kim-Renaud et al., 2005). Dalam hal ini, Korea Selatan menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sarana penting untuk mengakumulasi modal manusia yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi selalu berubah seiring waktu, sehingga sistem pendidikan di Korea Selatan harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan tersebut. Selain itu, sektor swasta berperan besar dalam mendanai lebih dari separuh biaya pendidikan di negara ini. Pendidikan di Korea Selatan juga terbukti efektif dalam meningkatkan pemerataan di kalangan warga negara, sekaligus menunjukkan bahwa sistem pendidikan di negara tersebut bersifat inklusif dan tidak diskriminatif (Lee, 2001). Pendidikan sepanjang hidup merupakan bagian integral dari sistem pendidikan formal di Korea Selatan. Masyarakat memiliki berbagai cara untuk belajar, seperti mengikuti sekolah sipil, sekolah yang berfokus pada industri, kelas malam, kelas daring, program akreditasi mandiri untuk belajar mandiri, sistem kredit, serta universitas cyber dan pembelajaran jarak jauh (KEDI, 2019).

Jika dibandingkan dengan Indonesia, pendekatan masyarakat Korea Selatan terhadap pendidikan sangat berbeda dalam hal semangat dan sistem yang diterapkan. Di sisi lain, meskipun pendidikan juga dianggap penting di Indonesia, tekanan yang dirasakan oleh masyarakat tidak sebesar di Korea Selatan. Di Indonesia, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sering kali ada masalah dalam hal pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil. Masyarakat Indonesia juga tidak memiliki tingkat kecemasan yang sama terkait pendidikan seperti yang terjadi di Korea

Selatan. Sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya guru berkualitas, dan kurangnya dukungan dari sektor swasta untuk membiayai pendidikan secara signifikan. Selain itu, di Korea Selatan, sektor swasta berperan besar dalam pendanaan pendidikan, yang mencakup lebih dari setengah biaya pendidikan. Ini sangat berbeda dengan Indonesia, di mana pendanaan pendidikan lebih banyak bergantung pada anggaran negara, dan sektor swasta belum berperan sebesar di Korea Selatan dalam mendukung sistem pendidikan. Korea Selatan juga telah mengintegrasikan konsep pendidikan sepanjang hidup, dengan berbagai jalur pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti sekolah sipil, kelas malam, program online, dan universitas cyber. Ini memungkinkan masyarakat untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka sepanjang hidup. Di Indonesia, meskipun ada program pendidikan non-formal dan pendidikan jarak jauh, akses dan kualitasnya masih terbatas dan belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mana lagi, di Indonesia, pendidikan belum sepenuhnya dianggap sebagai kebutuhan utama dalam hidup.

2. Penggunaan Sosial Media



Sumber : GWI.com, cable.co.uk, datareportal.com & interad.com

Perbedaan penggunaan media sosial antara Indonesia dan Korea Selatan sangat mencolok, terutama jika dilihat dari rata-rata waktu yang dihabiskan setiap hari. Di Indonesia, waktu yang dihabiskan untuk media sosial rata-rata mencapai 3 jam 11 menit per hari, menunjukkan intensitas interaksi yang tinggi dengan berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk tujuan komunikasi, hiburan, dan mencari informasi. Beberapa faktor dapat menjelaskan tingginya penggunaan media sosial di Indonesia. Pertama, Indonesia memiliki populasi muda yang besar yang lebih aktif dalam menggunakan media sosial.

Kedua, keterbatasan ekonomi membuat smartphone menjadi pilihan hiburan yang terjangkau. Di Indonesia, keterbatasan ekonomi juga berperan besar dalam pola penggunaan media sosial. Banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akses terbatas terhadap hiburan lainnya, sehingga smartphone menjadi solusi utama. Smartphone menjadi alat hiburan yang terjangkau, yang memungkinkan pengguna mengakses media sosial, menonton video, bermain game, dan lainnya tanpa harus membeli perangkat hiburan lain yang lebih mahal, seperti konsol game. Selain itu, penggunaan smartphone yang mudah dijangkau dengan harga terjangkau memungkinkan banyak orang untuk terhubung dengan dunia maya, meskipun mereka mungkin tidak mampu membeli perangkat elektronik lainnya. Smartphone kini berfungsi sebagai alat multifungsi yang tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai alat hiburan utama, menggantikan peran perangkat lain yang lebih mahal.

Ketiga, masuknya *smartphone* murah dari negara-negara seperti Korea Selatan dan Tiongkok juga mempengaruhi masyarakat Indonesia, yang secara tidak langsung terpengaruh oleh strategi ekonomi negara-negara tersebut aktor lainnya adalah masuknya *smartphone* murah ke pasar Indonesia, yang didorong oleh produsen dari negara-negara seperti Korea Selatan dan Tiongkok. *Smartphone* murah ini membuat masyarakat Indonesia lebih mudah mengakses internet dan media sosial. Ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap pola penggunaan media sosial di Indonesia, karena harga perangkat yang terjangkau membuatnya lebih mudah dijangkau oleh hampir semua kalangan. Masyarakat Indonesia, tanpa disadari, menjadi bagian dari ambisi ekonomi negara-negara tersebut dengan semakin banyaknya *smartphone* murah yang beredar di Indonesia. Pada gilirannya, ini meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap media sosial dan platform digital. (GWI.com, cable.co.uk, PinterPolitik).

Sedangkan di Korea Selatan, Korea Selatan dikenal dengan budaya kerjanya yang sangat disiplin dan efisien. Banyak orang di sana mengutamakan waktu mereka untuk bekerja, belajar, atau melakukan kegiatan yang produktif. Dalam budaya Korea Selatan, ada kecenderungan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, meskipun media sosial digunakan untuk komunikasi, hiburan, atau informasi, durasi penggunaannya cenderung lebih terbatas dan lebih teratur. Selain itu, masyarakat Korea Selatan cenderung lebih fokus pada platform media sosial yang lebih spesifik atau terbatas, seperti KakaoTalk untuk komunikasi sehari-hari, dan platform lainnya untuk tujuan tertentu. Penggunaan media sosial yang lebih fokus dan tertarget ini memungkinkan mereka untuk menghemat waktu dan menghindari konsumsi informasi yang berlebihan yang sering terjadi di Indonesia.

Di Korea Selatan, pendidikan juga memainkan peran besar dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Banyak siswa dan mahasiswa di Korea Selatan menghabiskan waktu mereka untuk belajar secara online atau mengikuti kursus tambahan, yang seringkali mengurangi waktu mereka untuk bersosialisasi melalui media sosial. Sistem pendidikan yang sangat kompetitif di Korea Selatan membuat banyak orang lebih fokus pada studi atau pekerjaan, sehingga mereka lebih selektif dalam menggunakan waktu mereka untuk media sosial.

Perbedaan dalam penggunaan media sosial antara Indonesia dan Korea Selatan bisa dipahami melalui teori modernisasi, yang mengungkapkan bahwa perkembangan ekonomi yang pesat hanya bisa dicapai dengan adopsi teknologi, struktur sosial, dan pola pikir yang lebih modern. Korea Selatan memiliki waktu penggunaan media sosial yang lebih rendah dibandingkan Indonesia, yang mencerminkan pola hidup yang lebih efisien dan produktif. Masyarakat Korea Selatan, dengan orientasi pada pendidikan dan pengembangan keterampilan, lebih fokus pada aktivitas yang mendukung karier dan produktivitas, sesuai dengan prinsip modernisasi yang menekankan pada pendidikan dan teknologi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, Indonesia memiliki durasi penggunaan media sosial yang lebih tinggi, yang sebagian besar digunakan untuk hiburan, komunikasi sosial, dan konsumsi informasi. Hal ini bisa menunjukkan adanya pola sosial yang lebih konsumtif dan kurang berfokus pada pengembangan keterampilan teknis atau peningkatan produktivitas yang dapat mendukung pembangunan ekonomi. Indonesia, dengan populasi muda yang besar, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana pengembangan ekonomi digital, namun saat ini lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi dan sosial.

Perbedaan dalam penggunaan media sosial ini berhubungan langsung dengan keterbelakangan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan Korea Selatan. Teori modernisasi menyarankan bahwa negara harus mengadopsi pola sosial yang lebih produktif dan berfokus pada peningkatan keterampilan untuk mendorong pembangunan ekonomi. Jika di Indonesia,

mayoritas waktu lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan konsumsi di media sosial, hal ini akan menghambat proses modernisasi dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, Korea Selatan telah lebih dahulu menerapkan pola penggunaan teknologi dan waktu yang lebih efisien, yang mendukung kemajuan ekonomi mereka.

3. Agama

Teori agama yang dikemukakan oleh Max Weber menyoroti keterkaitan antara nilai-nilai keagamaan dengan perilaku masyarakat yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Weber menunjukkan bahwa ajaran agama tertentu, khususnya Protestanisme, berkontribusi pada pembentukan budaya kerja yang disiplin, efisien, dan terorganisir—hal-hal yang menjadi pondasi kapitalisme modern. Dalam ajaran Calvinisme, konsep predestinasi mengajarkan bahwa nasib akhir seseorang telah ditentukan oleh Tuhan. Pemahaman ini mendorong individu untuk menunjukkan keberhasilan melalui kerja keras, penghematan, dan investasi demi pertumbuhan. Pola pikir ini melahirkan budaya ekonomi yang menekankan rasionalitas dan efisiensi sebagai kunci utama. Dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia, nilai-nilai religius yang menekankan kerja keras dan tanggung jawab pribadi menjadi dorongan penting untuk peningkatan keterampilan dan produktivitas. Dalam masyarakat yang menjunjung nilai-nilai tersebut, pendidikan dan pelatihan dipandang sebagai sarana untuk mencapai keberhasilan, baik secara individu maupun kolektif.

Weber juga membahas bagaimana agama-agama tertentu, seperti Konfusianisme dan Hindu, cenderung memprioritaskan stabilitas sosial dibandingkan perubahan. Akibatnya, masyarakat yang dipengaruhi oleh ajaran semacam ini sering kali kurang terdorong untuk melakukan inovasi atau reformasi ekonomi dibandingkan masyarakat yang memiliki budaya kerja berbasis rasionalitas dan individualisme. Dalam praktiknya, teori Weber dapat digunakan untuk memahami perbedaan kecepatan perkembangan ekonomi di berbagai negara. Negara-negara yang budayanya menekankan inovasi dan dedikasi, seperti Korea Selatan atau negara-negara di Eropa Barat, cenderung lebih cepat dalam memajukan sumber daya manusia dan ekonominya. Sebaliknya, masyarakat yang nilai-nilainya masih sangat tradisional sering kali menghadapi tantangan dalam mempercepat modernisasi.

Kesimpulannya, Weber menganggap agama tidak hanya sebagai urusan spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang memainkan peran besar dalam membentuk pola pikir masyarakat mengenai kerja, inovasi, dan kemajuan ekonomi.

Pengaplikasian teori Max Weber tentang hubungan antara agama, etos kerja, dan pembangunan ekonomi dapat dilihat secara berbeda di Indonesia dan Korea Selatan, meskipun keduanya memiliki latar belakang keagamaan dan budaya yang memengaruhi pola perkembangan ekonominya.

- Di Indonesia, agama Islam memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, usaha keras, dan kebersamaan sering kali mendorong individu untuk bekerja secara kolektif dalam mencapai tujuan bersama, seperti yang terlihat dalam budaya gotong royong. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks ekonomi modern sering kali terhambat oleh interpretasi agama yang konservatif atau tradisional. Misalnya, meskipun terdapat dorongan untuk bekerja keras, sistem nilai sosial sering kali lebih mengutamakan kestabilan dan hubungan kekeluargaan ketimbang efisiensi atau rasionalitas yang menjadi inti dari kapitalisme modern menurut Weber. Selain itu, meskipun banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang mulai mengajarkan kewirausahaan atau keterampilan teknis, sistem pendidikan di

banyak daerah masih menghadapi kesenjangan kualitas. Hal ini berimbas pada kurangnya keterampilan teknis dan budaya kerja yang rasional dan terorganisir. Banyak perusahaan, terutama di sektor usaha kecil menengah (UKM), lebih mengutamakan loyalitas keluarga atau hubungan sosial daripada profesionalisme dan efisiensi kerja. Ini membuat penerapan nilai-nilai Weberian tentang rasionalitas dan efisiensi dalam pengelolaan ekonomi dan SDM menjadi lebih sulit. Namun, di sisi lain, ada sektor-sektor tertentu yang sudah mulai menunjukkan perubahan. Misalnya, di industri teknologi dan digital, seperti perusahaan *gojek* dan *tokopedia*. Perusahaan-perusahaan ini menerapkan prinsip efisiensi dan profesionalisme, mengutamakan kompetensi dalam manajemen dan pengembangan sumber daya manusia. Budaya kerja di perusahaan-perusahaan ini lebih berorientasi pada hasil, dengan fokus pada inovasi dan peningkatan keterampilan. Ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk mengimplementasikan teori Weber dalam konteks Indonesia, terutama dalam sektor-sektor yang lebih modern dan berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan etos kerja yang rasional dan efisien yang sejalan dengan teori Weber, tantangan terbesar ada pada pemerataan pendidikan dan peralihan dari nilai-nilai tradisional menuju budaya kerja yang lebih modern dan terorganisir.

- Di Korea Selatan, penerapan teori Max Weber tentang hubungan antara agama, etos kerja, dan pembangunan ekonomi sangat terlihat dalam perkembangan sosial dan ekonomi negara tersebut. Pengaruh Konfusianisme dan, dalam beberapa aspek, Protestantisme, memberikan kontribusi besar terhadap budaya kerja yang sangat disiplin dan berorientasi pada efisiensi serta kesuksesan duniawi. Setelah Perang Korea, Korea Selatan mengalami transformasi ekonomi yang cepat, yang sebagian besar didorong oleh etos kerja yang sangat terorganisir dan rasional. Konfusianisme, yang mengajarkan pentingnya kerja keras, pendidikan, dan menghormati otoritas, sangat mempengaruhi perilaku individu dalam dunia kerja. Masyarakat Korea Selatan menghargai pendidikan tinggi, yang dilihat sebagai jalan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi. Pendidikan ini, terutama di bidang teknologi dan sains, tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menciptakan etos kerja yang didorong oleh kesungguhan dan ketekunan. Selain itu, pengaruh Protestanisme yang mulai berkembang di Korea Selatan pada abad ke-20 memperkenalkan nilai-nilai rasionalitas dan efisiensi yang mendalam. Beberapa pemimpin bisnis dan politisi Korea Selatan pada waktu itu mengadopsi pandangan dunia yang didorong oleh prinsip-prinsip Protestan, seperti pentingnya efisiensi dan perencanaan jangka panjang dalam berbisnis. Dalam konteks ini, para pengusaha Korea, seperti yang ada dalam *chaebol* (konglomerat besar di Korea), berfokus pada investasi jangka panjang, pengelolaan sumber daya secara rasional, dan pencapaian tujuan ekonomi yang ambisius.

Contoh konkret dari penerapan teori Weber di Korea Selatan bisa dilihat dalam cara perusahaan-perusahaan besar ini mengelola bisnisnya. Mereka tidak hanya mengutamakan profit jangka pendek, tetapi lebih menekankan pada pengelolaan perusahaan secara efisien dan terorganisir. Ini mencerminkan etos kerja yang rasional dan terstruktur yang Weber anggap sebagai ciri khas kapitalisme modern. Mereka juga memberikan pelatihan yang intensif kepada pekerjanya, yang mengarah pada

pengembangan SDM yang sangat terampil dan terdidik, yang pada gilirannya mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Korea Selatan juga berhasil menciptakan "Budaya Inovasi," yang dipengaruhi oleh nilai-nilai etos kerja yang dibangun di atas prinsip-prinsip rasionalitas. Pencapaian negara ini dalam industri teknologi tinggi, seperti dalam pengembangan semikonduktor, elektronik, dan otomotif, menunjukkan bagaimana etos kerja yang keras dan efisien dapat mengarah pada kemajuan ekonomi yang luar biasa. Inovasi ini didorong oleh keyakinan bahwa kerja keras dan perencanaan yang rasional akan menghasilkan hasil yang lebih besar, yang sejalan dengan pandangan Weber tentang hubungan antara etos kerja dan kapitalisme.

4. Pola Konsumsi

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di 2023, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia mencapai 1,42 juta rupiah per bulan pada Maret 2023, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan adanya peningkatan konsumsi masyarakat yang berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan, meskipun dengan variasi signifikan antar wilayah.

Pola konsumsi makanan juga menunjukkan perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Setiap daerah memiliki kebiasaan konsumsi yang berbeda, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Hal ini mengarah pada kebutuhan yang beragam untuk penyediaan dan distribusi makanan, yang memengaruhi harga dan ketersediaan makanan di pasar. Beberapa jenis makanan lebih banyak dikonsumsi di wilayah tertentu, sementara yang lain lebih sedikit, yang mempengaruhi perencanaan dan kebijakan ekonomi nasional terkait sektor pangan. Pola konsumsi makanan masyarakat cenderung berubah seiring waktu. Perbedaan pola konsumsi makanan antar daerah juga bisa terjadi. Perubahan-perubahan ini, baik antar wilayah maupun dalam periode waktu tertentu, akan memengaruhi jumlah makanan yang perlu disediakan dan bagaimana distribusinya agar harga makanan tetap terjangkau oleh masyarakat. Penyajian data pola konsumsi di tingkat nasional sangat berguna untuk menganalisis kebutuhan konsumsi masyarakat secara lebih mendalam, sehingga dapat diketahui komoditas mana yang lebih banyak atau sedikit dikonsumsi.

Pola konsumsi masyarakat Indonesia, yang tercermin dalam data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan ekonomi dan politik negara. Kenaikan pengeluaran per kapita menunjukkan adanya perubahan dalam kebiasaan konsumsi, di mana masyarakat kini lebih memilih makanan olahan dan siap saji. Perubahan ini mencerminkan gaya hidup yang semakin mencari kemudahan dan efisiensi waktu, seiring dengan transformasi Indonesia dari negara agraris menjadi negara industri. Pola konsumsi ini meningkatkan permintaan terhadap produk-produk industri makanan, yang pada gilirannya mempengaruhi struktur pasar dan sektor ekonomi lainnya.

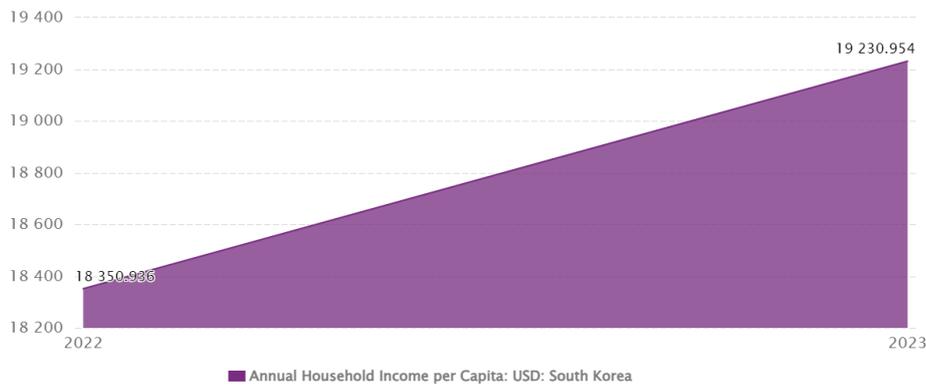
Dalam konteks ekonomi, bertambahnya konsumsi makanan olahan berkontribusi pada penguatan sektor industri serta membuka lapangan pekerjaan, terutama dalam industri pengolahan makanan dan distribusi. Namun, ketergantungan pada produk-produk industri ini juga mengindikasikan berkurangnya peran sektor pertanian lokal. Hal ini menjadi tantangan besar dalam merancang kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pertanian, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, perlu menyesuaikan diri dengan perubahan pola konsumsi yang lebih mengarah ke produk-produk industri. Dari sisi politik ekonomi, perubahan pola makan ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Masyarakat dengan daya beli lebih tinggi lebih mudah mengakses makanan olahan, sementara mereka yang berpendapatan rendah harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk memenuhi

kebutuhan pangan dasar. Ketimpangan ini dapat mempengaruhi kebijakan distribusi pangan dan harga, yang menjadi isu penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, pola makan masyarakat Indonesia yang terus berkembang berpengaruh signifikan terhadap arah pembangunan ekonomi dan politik di Indonesia.

Pola makan masyarakat miskin memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam hal ketahanan pangan, distribusi pendapatan, dan pengeluaran rumah tangga. Sebagian besar masyarakat miskin lebih mengandalkan konsumsi makanan yang murah dan bergizi rendah, seperti beras, mie instan, dan makanan cepat saji lainnya yang lebih terjangkau. Namun, ketergantungan ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, karena pola makan yang tidak bergizi berisiko meningkatkan prevalensi penyakit terkait gizi buruk. Hal ini dapat menghambat produktivitas kerja dan kualitas tenaga kerja di sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada kesehatan masyarakat. Selain itu, fenomena ini juga memperburuk ketimpangan sosial, di mana lapisan masyarakat yang memiliki daya beli lebih tinggi bisa mengakses makanan bergizi lebih baik, sedangkan masyarakat miskin semakin sulit mengakses pangan bergizi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, ketidakmerataan konsumsi pangan ini bisa memperlambat pencapaian pemerataan ekonomi yang inklusif. Kesenjangan ini menjadi isu penting dalam kebijakan ekonomi Indonesia, di mana pemerintah harus memastikan adanya intervensi untuk menjaga kestabilan harga pangan dan memberikan akses pangan yang lebih merata. Penting juga untuk dicatat bahwa kebijakan bantuan sosial dan subsidi pangan yang diberikan pemerintah bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat tergantung pada distribusinya yang adil dan tepat sasaran. Dalam konteks pembangunan ekonomi, tantangan besar adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat miskin tanpa mengabaikan sektor pertanian lokal yang juga penting dalam ketahanan pangan nasional.

Secara keseluruhan, pola makan masyarakat miskin di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Tidak hanya berhubungan dengan masalah kesehatan, tetapi juga terkait erat dengan ketimpangan sosial yang mempengaruhi distribusi sumber daya dan kebijakan ekonomi secara keseluruhan.

Sementara itu, di Korea Selatan pendapatan rumah tangga per kapita di Korea Selatan tercatat sebesar 19,230.954 USD pada 2023, mencatatkan rekor tertinggi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 18,350.936 USD pada 2022. Data pendapatan rumah tangga per kapita di Korea Selatan diperbarui setiap tahun, dengan rata-rata 14,027.328 USD dari tahun 2003 hingga 2023, berdasarkan 21 pengamatan. Angka tertinggi yang tercatat adalah 19,230.954 USD pada 2023, sementara angka terendah tercatat pada 2003 dengan 7,685.194 USD. Data ini terus aktif dan dilaporkan oleh CEIC Data, serta tercatat dalam kategori Global Economic Monitor World Trend Plus



Sumber ; ceicdata.com

Pola konsumsi masyarakat Korea Selatan dapat terlihat jelas dalam berbagai perubahan yang terjadi dalam kebiasaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan cara mereka makan, berbelanja, dan menghabiskan uang untuk barang dan jasa. Salah satu contoh nyata yang menggambarkan pola konsumsi ini adalah pergeseran menuju makanan olahan dan siap saji. Semakin banyak orang Korea yang memilih makanan cepat saji, seperti mi instan atau makanan beku yang praktis untuk dikonsumsi, terutama bagi mereka yang sibuk dan tidak memiliki banyak waktu untuk memasak. Hal ini terlihat jelas di berbagai convenience store dan supermarket yang menawarkan beragam produk makanan cepat saji. Makanan seperti ramen dan bibimbap instan telah menjadi pilihan utama bagi banyak orang Korea. Selain itu, pola konsumsi juga semakin didorong oleh teknologi. Masyarakat Korea semakin beralih ke belanja online melalui platform e-commerce seperti Coupang, Gmarket, dan 11st. Pembelian barang-barang mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga elektronik dan fashion kini lebih mudah dilakukan secara online. Hal ini sejalan dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi yang memungkinkan konsumen untuk berbelanja dengan lebih praktis dan efisien. Misalnya, banyak orang yang membeli gadget, pakaian, dan bahkan makanan secara daring, yang mengubah cara orang Korea menghabiskan uang mereka.

Sektor lain yang menunjukkan perubahan signifikan dalam pola konsumsi adalah kecantikan dan perawatan diri. Korea Selatan memiliki budaya kecantikan yang sangat kuat, dan ini tercermin dalam meningkatnya konsumsi produk-produk kecantikan, seperti skincare dan kosmetik. Merek-merek lokal terkenal seperti Innisfree dan Laneige tidak hanya populer di pasar internasional, tetapi juga sangat diminati di dalam negeri. Produk kecantikan kini menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari, mencerminkan bagaimana masyarakat Korea memprioritaskan penampilan dan perawatan diri.

Tren konsumsi juga tercermin pada gaya hidup sehat. Semakin banyak orang Korea yang memilih untuk mengonsumsi makanan sehat, seperti produk organik atau berbasis nabati, serta lebih banyak berinvestasi dalam peralatan olahraga dan keanggotaan di gym. Kesadaran akan pentingnya kesehatan mendorong mereka untuk mengalokasikan lebih banyak uang untuk kebugaran dan makanan yang lebih bergizi. Gaya hidup sehat ini menjadi semakin populer, dengan semakin banyaknya orang yang mengutamakan olahraga dan pola makan yang lebih baik. Perubahan pola konsumsi ini juga menciptakan kesenjangan antara generasi muda dan yang lebih tua. Generasi muda cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk teknologi terbaru, hiburan, dan gaya hidup modern, seperti berlangganan layanan streaming atau membeli gadget canggih. Sebaliknya, generasi yang lebih tua, terutama mereka yang sudah pensiun atau mendekati usia pensiun, cenderung menghabiskan uang mereka untuk kebutuhan dasar, seperti makanan dan perawatan kesehatan. Kesenjangan ini menggambarkan perbedaan dalam cara orang menghabiskan uang mereka, yang sangat dipengaruhi oleh usia, status ekonomi, dan kebutuhan pribadi.

Secara keseluruhan, perubahan pola konsumsi di Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, urbanisasi, dan pergeseran gaya hidup masyarakat. Dari makanan olahan yang praktis hingga belanja online dan produk-produk kecantikan, semua ini menunjukkan betapa konsumsi masyarakat Korea semakin berfokus pada kenyamanan, efisiensi, dan peningkatan kualitas hidup. Perubahan ini, pada gilirannya, berkontribusi pada pertumbuhan sektor industri yang lebih luas dan mendorong ekonomi Korea Selatan ke arah yang lebih modern dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Indonesia perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih terampil dan kompeten. Salah satu pendekatan yang relevan untuk memahami perbedaan kemajuan antara Indonesia dan Korea Selatan adalah teori modernisasi. Teori ini menyatakan bahwa untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial, suatu negara harus melalui serangkaian tahap perkembangan yang melibatkan perubahan struktural di berbagai sektor. Dalam konteks Indonesia, teori ini menekankan pentingnya transformasi dalam sektor pendidikan, ekonomi, dan sistem politik. Menurut teori modernisasi, negara-negara maju seperti Korea Selatan berhasil karena mereka telah mengadopsi pola pembangunan yang terorganisir dan terstruktur, dengan fokus pada peningkatan pendidikan, inovasi, dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Sebaliknya, negara yang masih tertinggal, seperti Indonesia, seringkali terhambat oleh kelemahan dalam institusi, pendidikan yang tidak merata, serta kebijakan yang tidak konsisten. Dengan memfokuskan diri pada perbaikan dalam sektor-sektor tersebut, Indonesia dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara lebih optimal, sebagaimana yang dilakukan oleh Korea Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda Febri Kinanti, et al. "Analisis Pola Konsumsi Di Indonesia Sebagai Indikator Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, vol. 3, no. 2, 2024, pp. 19–32.
- Budiman Arif. 1995, Teori pembartngunan Dunia Ketiga. *PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta*
- Hindun Qurrotu Aini, and Abdal Malik Fajar Alam. "Perbandingan Kebijakan Pendidikan Antara Negara Korea Selatan Dan Korea Utara." *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 29–35.
- KEDI. *A Window into Korean Education*. 2019, p. 25.
- Lee, J. (2001). *Education Policy in the Republic of Korea: Building Block or Stumbling Block?* (p. 27).
- Rahayu, Teguh Imam. "Teori Pembangunan Dunia Ke-3 Dalam Teori Modernisasi Sub Teori Harrod-Domar." *Gema Eksos*, vol. 6, no. 1, 2010, pp. 69–82.
- Rompas, Welson Y. "Analisis Tentang Teori Modernisasi." *Karya Ilmiah.*, 2009, pp. 1–24.
- Rompas, Welson Y. "Analisis Tentang Teori Modernisasi." *Karya Ilmiah.*, 2009, pp. 1–24.
- Ryang, J. M., and Lee Woojin. *Korean Education System*. no. 1, 2018, p. 64.
- Setiawan, Ferry. "Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke -3 Dalam Teori Modernisasi Terhadap Administrasi Pembangunan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, vol. 8, no. 2, 2019, pp. 59–60.
- Solikatun, et al. "Kemiskinan Dalam Pembangunan." *Jurnal Analisa Sosiologi*, vol. 3, no. 1, 1945, pp. 70–90.
- Wardani, Marlina Ramadhanti. "Strategi Pemerintah Korea Selatan Dalam Mengatasi Krisis Demografi Di Era Moon Jae In." *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 6, no. 11, 2018, pp. 10–27.
- Zafirovski, Milan. "(Pre-)Capitalism and the 'Spirit' of Protestantism—the Max Weber Reverse Thesis of Economic Conditions of Calvinism." *Social Epistemology*, vol. 30, no. 1, 2016, pp. 89–129, <https://doi.org/10.1080/02691728.2014.884182>.